



NEWSLETTER PUSDATIN

Daftar Isi

- Transformasi Digital Kementerian Pertanian Makin Menguat, Indeks SPBE 2025 Raih Predikat Memuaskan, Halaman 1
- Menguatkan Manajemen SPBE: Kerja Bersama Menuju Transformasi Digital yang Berkelanjutan, Halaman 3
- Memperkuat Benteng Digital: Sosialisasi Security Awareness Bangun Budaya Keamanan Kolektif, Halaman 4
- Pusdatin Kementan Perkuat Penerapan SMKI melalui Security Awareness Audit Internal, Halaman 6
- “Birokrasi Digital: Sinergi Keramahan dan Kewaspadaan”, Halaman 8
- Kementan Susun Rencana Tindak Lanjut Hasil IKASANDI 2025 untuk Perkuat Keamanan Siber, Halaman 9
- Menakar Ketahanan Pangan Indonesia Lewat Neraca Bahan Makanan, Halaman 11

Mohon Kesediaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan

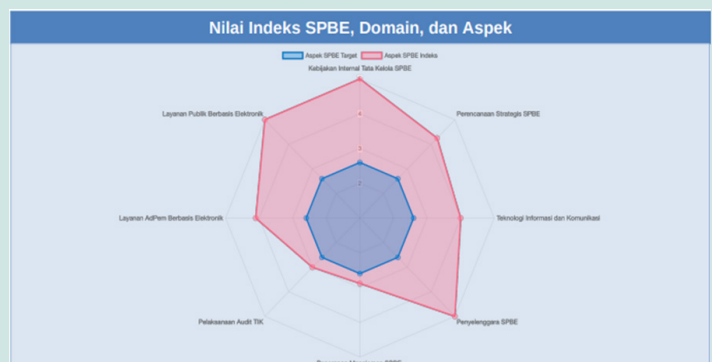


bit.ly/surveipusdatin

Transformasi Digital Kementerian Pertanian Makin Menguat, Indeks SPBE 2025 Raih Predikat Memuaskan

Kementerian Pertanian terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. Berdasarkan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Indeks SPBE Kementerian Pertanian mencapai nilai 4,23 dengan predikat Memuaskan.

Capaian ini mencerminkan konsistensi Kementerian Pertanian dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.



Tim Redaksi

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian

Redaktur:

Kepala Bagian Umum

Editor:

Roydatul Zikria, S.Si., M.S.E
Dr. Nugroho Setyabudhi, S.Kom., MM
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si
Suyati, S.Kom
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Lilik Wulaningtyas, S.Kom

Fotografer:

Sri Lestari, SE
Iswadi

Desain Grafis:

Dhanang Susatyo, SE
Muchammad Eko Darwanto, ST

Sekretariat:

Rizky Purnama R, S.Kom
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Rahma Andany, S.Kom
Yusri Ardi, S.Kom
Marwati
Priatna Sari
Aryo Wicaksono, S.Kom, M.m

Alamat Redaksi



**PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN**
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 7822638
e-mail : layanan.data@pertanian.go.id

Kinerja Unggul pada Kebijakan dan Layanan Digital

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa Domain Kebijakan SPBE Kementerian Pertanian memperoleh nilai maksimal 5,00, menandakan kebijakan internal SPBE telah tersusun sangat matang, komprehensif, dan selaras dengan regulasi nasional. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting bagi implementasi SPBE yang berkelanjutan di seluruh unit kerja. Pada Domain Layanan SPBE, Kementerian Pertanian mencatat nilai 4,46, dengan Layanan Publik Berbasis Elektronik meraih nilai sempurna 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan sektor pertanian telah memberikan manfaat nyata, baik bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan, melalui layanan yang semakin mudah diakses, transparan, dan responsif.

Penguatan Tata Kelola dan Penyelenggara SPBE

Dari sisi Domain Tata Kelola SPBE, Kementerian Pertanian memperoleh nilai 4,30, didukung oleh capaian optimal pada aspek Penyelenggara SPBE dengan nilai 5,00. Ini mencerminkan kuatnya peran kelembagaan, koordinasi, serta komitmen pimpinan dalam mengawal transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertanian.

Area Strategis untuk Peningkatan Berkelanjutan

Meski mencatat hasil yang membanggakan, pemantauan SPBE juga menjadi cermin untuk perbaikan berkelanjutan. Domain Manajemen SPBE memperoleh nilai 2,91, yang menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut, khususnya pada aspek manajemen perubahan, kompetensi sumber daya manusia SPBE, manajemen aset TIK, serta penerapan manajemen layanan dan risiko SPBE secara lebih terstruktur. Temuan ini menjadi dasar penting dalam menyusun langkah strategis ke depan, agar transformasi digital tidak hanya unggul pada kebijakan dan layanan, tetapi juga kokoh dari sisi manajemen dan keberlanjutan.

Menuju Pemerintah Digital yang Terintegrasi

Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang akan bertransformasi dari Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi), capaian Kementerian Pertanian tahun 2025 menjadi modal kuat untuk melangkah lebih jauh. Fokus ke depan tidak lagi sekadar digitalisasi proses, tetapi membangun ekosistem digital pemerintahan yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada pengguna. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas unit kerja, meningkatkan kapabilitas SDM digital, serta memastikan SPBE memberikan nilai tambah nyata bagi pembangunan sektor pertanian dan pelayanan kepada masyarakat.

Penulis: Lilik W.

Menguatkan Manajemen SPBE: Kerja Bersama Menuju Transformasi Digital yang Berkelanjutan

Transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertanian terus menunjukkan arah yang positif. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 yang meraih nilai 4,23 dengan predikat Memuaskan. Capaian tersebut menegaskan bahwa kebijakan, tata kelola, serta layanan digital telah dibangun secara konsisten dan berada pada jalur yang sejalan dengan kebijakan nasional pemerintah digital.



Smart Governance

Di balik capaian tersebut, hasil pemantauan juga memberikan ruang refleksi yang penting bagi seluruh pengelola dan pengembang sistem informasi. Salah satu catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama adalah penguatan Manajemen SPBE. Aspek ini menjadi penopang utama agar transformasi digital tidak berhenti pada keberhasilan implementasi, tetapi mampu berlanjut secara berkesinambungan dan adaptif terhadap perubahan.

Manajemen SPBE sering kali bekerja di balik layar. Ia tidak selalu terlihat dalam bentuk aplikasi atau layanan baru, namun sangat menentukan bagaimana sistem direncanakan, dikelola, dikembangkan, dan dipertahankan nilainya dalam jangka panjang. Pengelolaan perubahan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, manajemen aset teknologi informasi, hingga kesiapan sistem untuk dievaluasi dan diaudit merupakan bagian dari proses yang menentukan kematangan SPBE secara menyeluruh.

Dalam konteks inilah, peran unit pengelola data dan sistem informasi menjadi semakin strategis. Tidak hanya sebagai penyedia infrastruktur dan aplikasi, tetapi juga sebagai penggerak konsistensi, integrasi, dan keberlanjutan SPBE di seluruh unit kerja. Melalui perencanaan yang terarah, pendampingan teknis, serta penguatan standar dan arsitektur, fungsi pengelolaan data dan sistem informasi berkontribusi memastikan bahwa setiap sistem yang dikembangkan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem digital Kementerian Pertanian.

Transformasi SPBE juga menuntut perubahan cara pandang dalam pengembangan sistem informasi. Sistem tidak lagi diposisikan sebagai produk akhir, melainkan sebagai layanan yang harus dikelola sepanjang siklus hidupnya. Pendekatan ini mendorong pengembangan sistem yang lebih siap dikelola, mudah dikembangkan, dan relevan dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan.

Capaian SPBE 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi tersebut. Predikat Memuaskan bukanlah titik akhir, melainkan pijakan untuk membangun transformasi digital yang lebih matang dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang erat antara pengambil kebijakan, pengelola SPBE, dan pengembang sistem informasi, Kementerian Pertanian diharapkan mampu mewujudkan ekosistem

pemerintah digital yang terintegrasi, andal, dan memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian dan masyarakat.

Penulis: Lilik W.

Memperkuat Benteng Digital:

Sosialisasi *Security Awareness* Bangun Budaya Keamanan Kolektif

Upaya penguatan kesadaran keamanan informasi terus dilakukan seiring meningkatnya ketergantungan organisasi terhadap sistem dan teknologi digital. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi *Security Awareness* yang digelar pada 28 November 2025 secara luring yang diadakan di Auditorium PSEKP Bogor maupun daring, sebagai bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap ancaman keamanan siber.

Kegiatan ini dibuka oleh Teuku Ardhianzah Dewantara Silang selaku Ketua Kelompok Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi (Kamsiber dan PDP) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), yang mewakili Kepala Pusdatin dengan membacakan sambutan pembukaan. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa keamanan informasi merupakan aspek fundamental dalam mendukung kelangsungan proses kerja organisasi di era digital yang semakin terkoneksi.



Acara Sosialisasi *Security Awareness* dibuka oleh Ketua Kelompok Kamsiber dan PDP Pusdatin Teuku Ardhianzah (kedua dari kiri) mewakili Kepala Pusdatin (28/11/2025)

Dalam sambutan Kepala Pusdatin yang dibacakan pada kesempatan tersebut

disampaikan bahwa informasi saat ini telah menjadi aset strategis organisasi. Namun, kemajuan teknologi juga diiringi dengan meningkatnya risiko ancaman siber, mulai dari serangan *malware*, *phishing*, hingga rekayasa sosial yang memanfaatkan kelengahan manusia. “Data global menunjukkan bahwa sebagian besar insiden keamanan informasi bukan disebabkan oleh kelemahan teknologi, tetapi oleh kesalahan atau kelalaian pengguna”, demikian disampaikan dalam sambutan tersebut

Lebih lanjut disampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan setiap pegawai dalam menjaga keamanan informasi. Keamanan siber tidak lagi dipandang semata sebagai urusan teknis, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh individu di lingkungan organisasi.

Selain membuka kegiatan, Ardhianzah juga hadir sebagai narasumber dengan memaparkan materi bertajuk Lanskap Keamanan Siber dan *Security Awareness* Kementerian Pertanian. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa objek yang perlu dilindungi dalam keamanan siber tidak hanya mencakup sistem dan infrastruktur teknologi, tetapi juga data dan informasi elektronik serta sumber daya manusia. Menurutnya, aspek manusia masih menjadi titik paling rentan dalam rantai pertahanan keamanan informasi.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan Tim *Security Operation Center* (SOC), selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 146.775 anomali trafik di lingkungan Kementerian Pertanian, disertai ratusan alert ancaman siber dengan tingkat keparahan tinggi hingga rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman siber bersifat nyata dan berpotensi menimbulkan dampak serius apabila tidak diantisipasi secara komprehensif.

“Ancaman siber tidak hanya berdampak pada sistem teknologi, tetapi juga dapat mengganggu proses bisnis dan layanan publik, termasuk potensi gangguan rantai pasok pertanian dan distribusi pangan”, ujar Teuku Ardhianzah. Ia menegaskan bahwa penguatan *security*

pada tahun 2025, kondisi yang membuka peluang besar bagi pemanfaatan teknologi sekaligus meningkatkan potensi ancaman siber.

Dalam sesi berikutnya, narasumber Claudia Dwi Amanda dari Badan Siber dan Sandi Negara, memaparkan materi bertajuk Membangun Budaya Keamanan Informasi di Lingkungan Kerja. Dalam paparannya, Claudia menekankan bahwa meningkatnya penetrasi internet di Indonesia turut memperluas permukaan serangan siber. Lebih dari 80 persen penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan internet pada tahun 2025, kondisi yang membuka peluang besar bagi pemanfaatan teknologi sekaligus meningkatkan potensi ancaman siber.

Menurut Claudia, jutaan hingga miliaran anomali trafik keamanan siber terdeteksi secara nasional sepanjang tahun 2025, dengan dominasi aktivitas *malware*, akses tidak sah, serta serangan *advanced persistent threat* (APT). “Keamanan siber tidak lagi cukup hanya mengandalkan teknologi. Manusia adalah target paling lemah sekaligus garda terdepan dalam pertahanan keamanan informasi”, tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar insiden berawal dari interaksi pengguna melalui email, tautan, maupun lampiran berbahaya.

Claudia menekankan bahwa perubahan budaya kerja menjadi kunci dalam penguatan keamanan siber. Ia mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan perilaku sadar keamanan siber dalam aktivitas sehari-hari, karena “keamanan siber adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya tim teknis”.

Pada sesi lainnya, narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Rindy, Ketua Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital, memaparkan materi bertajuk Mengamankan Data Pribadi dan Data Sensitif: Panduan Praktis dan Peran PPDP. Dalam paparannya, Rindy menekankan urgensi penerapan perlindungan data pribadi di tengah tingginya aktivitas digital masyarakat Indonesia dan meningkatnya kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi.

Rindy menjelaskan bahwa kebocoran data

Manager dari PT Neotech Cakrawala Indonesia. Dalam materinya bertajuk Pemanfaatan *Tools* untuk Eksploitasi Informasi Pribadi, Ajep menekankan bahwa keamanan tidak hanya soal kata sandi. Ia mengingatkan bahwa banyak informasi sensitif tersedia secara luas di internet dan dapat dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. “*Hacker* tidak selalu menjebol dinding, mereka mencari pintu yang terbuka”, ujarnya, merujuk pada praktik pengumpulan informasi dari sumber terbuka atau *Open Source Intelligence* (OSINT).

Ajep menjelaskan konsep lapisan internet yang dianalogikan sebagai gunung es, di mana hanya sekitar empat persen yang tergolong *surface web* dan dapat diakses oleh mesin pencari umum. Sebagian besar lainnya merupakan *deep web* yang berisi data sensitif seperti dokumen legal, catatan pemerintah, dan laporan keuangan, sementara sebagian kecil lainnya merupakan *dark web* yang kerap digunakan untuk aktivitas ilegal. Ia kemudian mendemonstrasikan bagaimana berbagai *tools* dan teknik sederhana dapat mengungkap data sensitif, mulai dari pemanfaatan mesin pencari perangkat internet seperti *Shodan*, teknik *Google dorking* untuk menemukan file terbuka, hingga eksploitasi metadata foto yang dapat mengungkap lokasi dan informasi teknis lainnya.

Menurut Ajep, serangan siber yang berhasil umumnya merupakan proses bertahap yang memanfaatkan akumulasi informasi kecil hingga akhirnya digunakan untuk meluncurkan serangan phishing yang sangat personal. Serangan semacam ini, yang ia sebut sebagai *hacking the human*, mengeksploitasi kelemahan psikologis manusia melalui rasa percaya, kepanikan, atau urgensi palsu. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap ciri-ciri email mencurigakan, serta kebiasaan memeriksa apakah data pribadi pernah terekspos dalam kebocoran data.

Sebagai penutup, Ajep memaparkan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan untuk memperkuat pertahanan individu, antara lain dengan menghindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak, tidak menggunakan satu kata sandi untuk banyak akun, serta mengaktifkan verifikasi dua langkah. Ia juga mengingatkan pentingnya memisahkan akun email berdasarkan peruntukan, menghindari

penggunaan kata sandi yang mudah ditebak, tidak menggunakan satu kata sandi untuk banyak akun, serta mengaktifkan verifikasi dua langkah. Ia juga mengingatkan pentingnya memisahkan akun email berdasarkan peruntukan, menghindari membagikan informasi sensitif di media sosial, serta segera melapor kepada tim TI apabila menemukan aktivitas digital yang mencurigakan.



Foto bersama peserta luring pada Penutupan Acara Sosialisasi Security Awareness di Auditorium PSEKP Bogor (28/11/2025)

Sosialisasi *Security Awareness* ini ditujukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya keamanan informasi dan perlindungan data pribadi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peserta diharapkan mampu mengenali berbagai potensi risiko keamanan siber, memahami dampaknya terhadap layanan publik dan reputasi institusi, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan secara konsisten.

Penyelenggaraan Sosialisasi *Security Awareness* Tahun 2025 ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung penerapan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data pribadi yang baik. Melalui peningkatan kesadaran, perubahan perilaku, dan tanggung jawab kolektif seluruh pegawai, keamanan sistem informasi diharapkan dapat terjaga secara optimal, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja digital yang aman, profesional, dan berintegritas

Penulis : Nugroho Setyabudhi

Pusdatin Kementan Perkuat Penerapan SMKI melalui Security Awareness Audit Internal

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian terus memperkuat penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) melalui kegiatan *Security Awareness* bertajuk “Pentingnya Audit Internal dalam Penerapan SMKI di Pusdatin” yang digelar secara daring pada Selasa (30/12/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Teuku Ardhianzah, Ketua Kelompok Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi Pusdatin. Peserta tidak hanya berasal dari internal Pusdatin, tetapi juga melibatkan staf Eselon I yang membidangi Data dan Informasi, sebagai bentuk penguatan kolaborasi lintas unit dalam penerapan keamanan informasi

Dalam sambutannya, Teuku Ardhianzah menegaskan bahwa audit internal merupakan instrumen strategis untuk memastikan sistem keamanan informasi berjalan optimal.

“Audit internal bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan seluruh kontrol keamanan berfungsi sebagaimana mestinya. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam melindungi aset informasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan data Kementerian Pertanian”, ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran sumber daya manusia dalam keberhasilan SMKI. “SDM adalah benteng pertahanan pertama. Karena itu, kami mendorong seluruh pegawai agar memahami perannya, patuh terhadap kebijakan keamanan informasi, serta tidak ragu melaporkan insiden yang terjadi”, tambahnya.

Kegiatan *Security Awareness* ini menghadirkan Konsultan ISO 27001 Boby Sibarani sebagai narasumber, yang memaparkan secara komprehensif konsep audit internal keamanan informasi berdasarkan ISO/IEC 27001:2022 dan ISO 19011. Dalam paparannya, Boby menjelaskan bahwa audit internal merupakan proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit serta mengevaluasi secara objektif sejauh mana

kriteria audit telah terpenuhi.

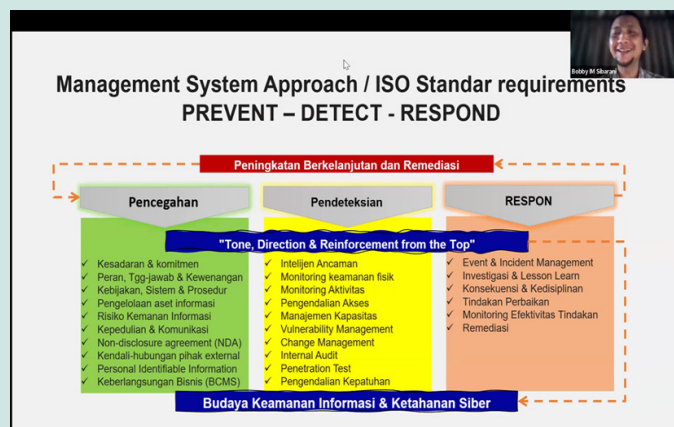
la menguraikan bahwa audit internal memiliki fungsi utama untuk menilai kesesuaian, efektivitas implementasi sistem manajemen, sekaligus membuka peluang perbaikan (*opportunity for improvement*). Audit juga membantu organisasi menemukan akar permasalahan (*root cause analysis*) serta menjadi alat ukur kinerja manajemen.

“Audit internal adalah alat manajemen untuk melihat kondisi organisasi secara nyata. Dari audit, kita bisa mengetahui apakah sistem sudah berjalan efektif, menemukan akar masalah, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan. Tujuan akhirnya adalah peningkatan berkelanjutan”, jelas Bobby.

Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa pelaksanaan audit internal harus mengacu pada prinsip-prinsip audit, antara lain integritas, penyampaian yang objektif, profesionalisme, independensi, pendekatan berbasis bukti, pendekatan berbasis risiko, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan risk-based auditing agar audit difokuskan pada area-area kritis yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan informasi.

Dalam sesi tersebut, Bobby turut menjelaskan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) sebagai kerangka kerja audit internal, mulai dari penetapan program audit, pelaksanaan audit, pemantauan dan evaluasi hasil audit, hingga perbaikan berkelanjutan. Peserta juga diperkenalkan dengan tahapan audit secara praktis, meliputi perencanaan audit, pembentukan tim audit, penyusunan *checklist*, pengumpulan bukti melalui wawancara, observasi dan peninjauan dokumen, penetapan temuan (kesesuaian, ketidaksesuaian, dan observasi), penyusunan laporan audit, serta pelaksanaan tindak lanjut perbaikan.

Selain aspek teknis, Bobby menyoroti pentingnya budaya keamanan informasi yang dibangun melalui kesadaran, perilaku, dan kapabilitas sumber daya manusia. Menurutnya, pegawai harus menjadi bagian dari sistem pertahanan organisasi, bukan justru menjadi titik terlemah.



Paparan Security Awareness oleh Narasumber Bobby Sibarani secara daring via Zoom Meeting (30/12/2025)

“Organisasi sering gagal bukan karena tidak punya sistem, tetapi karena orang-orangnya tidak sadar atau tidak tahu cara melapor. Karena itu, kesadaran, perilaku, dan kapabilitas SDM harus terus dibangun agar keamanan informasi benar-benar hidup dalam proses kerja sehari-hari”, ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman mulai dari perencanaan audit, pembentukan tim audit, teknik pengumpulan bukti, wawancara, penetapan temuan, hingga pelaporan dan tindak lanjut. Adapun capaian yang diharapkan meliputi meningkatnya kesadaran keamanan informasi, pemahaman persyaratan ISMS ISO 27001, penguasaan prinsip audit keamanan informasi, serta peningkatan kompetensi peserta agar mampu melaksanakan audit internal secara mandiri dan menindaklanjuti hasilnya.

Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, Pusdatin Kementan merekomendasikan penguatan implementasi SMKI melalui penyusunan dan pemutakhiran program audit internal secara berkala, peningkatan kompetensi auditor internal, serta penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan insiden keamanan informasi. Selain itu, setiap unit kerja didorong untuk secara aktif melakukan identifikasi risiko, memastikan ketersediaan informasi terdokumentasi sesuai persyaratan ISO/IEC 27001, serta menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan yang terukur. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya keamanan informasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam seluruh proses bisnis Kementan.

Melalui *Security Awareness* ini, Pusdatin Kementan berharap penerapan SMKI dapat semakin matang dan terintegrasi dalam seluruh proses bisnis, sehingga mampu mendukung

ketahanan siber dan perlindungan data secara berkelanjutan di sektor pertanian.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

“Birokrasi Digital: Sinergi Keramahan dan Kewaspadaan”

Saat ini, instansi pemerintah melalui layanan birokrasinya dituntut untuk mempercepat pelayanan yang diberikan. Inovasi yang diinginkan oleh masyarakat terkadang tidak memerlukan gebrakan yang dramatis, tetapi cukup dengan perubahan sederhana pada aspek layanan publik, meringkas proses bisnis, dan informasi yang dapat diakses secara mudah. Tetapi yang perlu disadari adalah, tuntutan-tuntutan tersebut bukanlah pekerjaan yang bisa dirampungkan dalam waktu singkat. Bayangkan, jika beberapa proses kerja yang telah puluhan tahun berjalan “manual”, diharuskan berganti menjadi proses elektronik yang saling terintegrasi. Transformasi ini bukan sekadar mengganti kertas dengan layar, melainkan mengubah pola pikir, alur kerja, dan standar akuntabilitas.

Perubahan birokrasi lainnya juga datang dari “arah lain”, dimana tuntutan untuk semakin transparan menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Keterbukaan informasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dari akuntabilitas, untuk memenuhi keinginan masyarakat yang semakin kritis dan “melek” digital. Mereka ingin tahu, memeriksa, membandingkan, dan bahkan menantang data yang disajikan pemerintah. Kondisi ini menempatkan instansi pada persimpangan yang menarik: bagaimana menjadi transparan tanpa mengorbankan keamanan, bagaimana memberikan akses tanpa membuka celah, dan bagaimana menjelaskan informasi tanpa menciptakan salah tafsir.



Dalam konteks reformasi birokrasi, transformasi digital dan keterbukaan informasi menjadi dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Reformasi menuntut penyederhanaan proses, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan. Digitalisasi menjadi alat utamanya. Namun alat ini hanya efektif bila disertai tata kelola yang matang, sistem yang andal, dan budaya kerja yang bersedia berubah. Lingkungan birokrasi yang pragmatis, adaptif, dan sadar risiko kini bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dasar untuk memastikan pelayanan publik tetap relevan di tengah dinamika teknologi yang semakin cepat.

Ramah informasi dalam konteks instansi pemerintah tidak lagi sekadar jargon layanan publik. Ini merupakan mandat strategis yang menyatukan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam satu ekosistem tata kelola. Ketika masyarakat menuntut kemudahan akses informasi, instansi yang menangani data dan teknologi informasi komunikasi dituntut menghadirkan layanan publik yang responsif sekaligus menjaga keandalan sistem. Kualitas tata kelola informasi kini menjadi salah satu tolok ukur utama kepercayaan publik.

Pelindungan data pribadi semakin menjadi kebutuhan dan isu sentral yang tak terelakan. Meningkatnya pertukaran data lintas platform antar instansi, menuntut penataan ulang atas prosedur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. Belum lagi aspek keamanan, yang berimbas pada pengendalian berlapis atas perangkat, jaringan, dan aplikasi pemerintah. Pelindungan yang kuat tidak hanya menjaga kerahasiaan, tetapi juga integritas dan ketersediaan informasi.

Namun aspek keamanan tersebut dihadapkan pada tuntutan kecepatan dan kenyamanan dari masyarakat. Sementara instansi pemerintah wajib memastikan setiap akses data dan informasi berada dalam koridor yang terjamin keamanannya. Keselarasan antara kelancaran dalam mengakses data dan informasi, dengan standar keamanan yang tinggi memerlukan kematangan baik dalam kebijakan dan teknologi. Pendekatan keamanan berdasarkan risiko (risk-based) menjadi sangat relevan untuk menentukan batas-batas yang tepat antara kemudahan dan pengendalian keamanan.

pemerintahan yang transparan. Namun keterbukaan bukan berarti membebaskan seluruh informasi untuk dikonsumsi publik. Dibutuhkan penapisan yang sistematis agar informasi yang memiliki nilai privasi, potensi risiko, dan implikasi keamanan tetap terlindungi. Di sini, peran pengelola data dan informasi menjadi sangat strategis dalam menentukan klasifikasi, validitas, dan konteks penyampaian data.

Agenda reformasi birokrasi mengharuskan instansi bergerak lebih adaptif dalam mengelola teknologi dan informasi. Penyederhanaan proses, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama untuk membangun birokrasi yang lincah. Integrasi sistem dan automasi proses kerja membuka peluang efisiensi yang signifikan, sekaligus meminimalkan hambatan struktural yang selama ini memperlambat layanan publik.

Untuk itulah diperlukan kerangka kerja yang mentransformasikan penyelenggaraan pemerintahan ke arah digital yang terpadu, efisien, dan transparan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hadir sebagai platform terpadu untuk mewujudkan tata kelola yang berorientasi data. SPBE mendorong interoperabilitas antar instansi, standarisasi arsitektur teknologi, serta penyelarasan kebijakan layanan digital. Dengan pendekatan arsitektur yang komprehensif, instansi dapat menyajikan layanan yang lebih terukur, transparan, dan aman. Kehadiran SPBE memperkuat kualitas proses bisnis sekaligus memperbaiki pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan digital.

Di era yang semakin terhubung di segala sektor kehidupan, memenuhi kebutuhan publik berarti

harus juga mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Instansi pengelola data dan teknologi informasi perlu terus memperkuat kolaborasi lintas unit kerja, memanfaatkan inovasi teknologi, dan memastikan seluruh kebijakan informasi sejalan dengan prinsip keamanan, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan fondasi tersebut, kepercayaan publik dapat dirawat dan birokrasi digital dapat berkembang secara berkelanjutan.

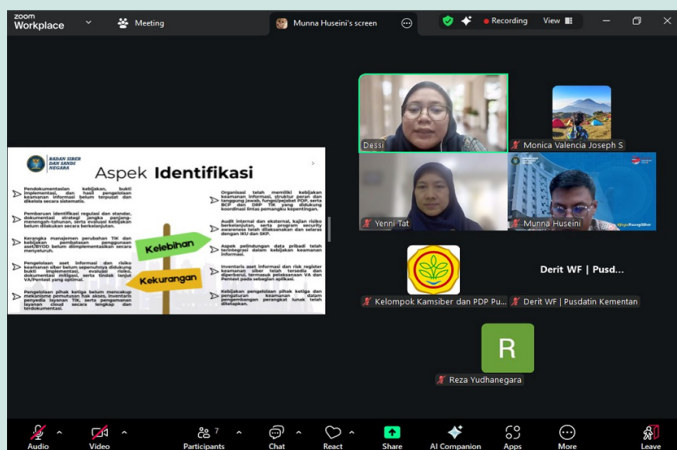
Penulis : Apri Setiawan

Kementan Susun Rencana Tindak Lanjut Hasil IKASANDI 2025 untuk Perkuat Keamanan Siber

Kementerian Pertanian melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menggelar rapat Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil pengukuran Tingkat Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) Tahun 2025 secara daring pada Jumat (19/12). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data pribadi di lingkungan Kementerian Pertanian

Acara dibuka oleh Teuku Ardhianzah, selaku Ketua Kelompok Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti hasil penilaian IKASANDI.

“IKASANDI bukan sekadar alat ukur, tetapi menjadi cermin kesiapan organisasi kita dalam menghadapi risiko siber. Rencana tindak lanjut yang kita susun hari ini diharapkan dapat menjadi pijakan nyata untuk memperkuat keamanan informasi dan perlindungan data pribadi secara berkelanjutan”, ujar Teuku Ardhianzah.



Zoom Meeting Penyusunan Rencana Tindak Lanjut hasil pengukuran Tingkat Kematangan IKASANDI Tahun 2025 (19/12)

Kegiatan ini dimoderatori oleh Yenni Tat, Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan PDP, yang mengarahkan diskusi agar seluruh rekomendasi dapat diterjemahkan menjadi langkah operasional lintas unit.

“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan, proses, dan implementasi teknis. Harapannya, setiap unit dapat memahami perannya masing-masing dalam mendukung peningkatan maturitas keamanan siber Kementerian Pertanian”, tutur Yenni Tat.

Sebagai narasumber, hadir Dessi Nursari dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memaparkan hasil pengukuran IKASANDI sekaligus memberikan arahan teknis terkait penguatan aspek identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan (gulih), dan persandian.

“Hasil IKASANDI menunjukkan Kementerian Pertanian sudah berada pada Level 3 atau Terdefinisi. Ini capaian yang baik, namun masih diperlukan penguatan pada sisi integrasi, dokumentasi, serta konsistensi implementasi agar dapat naik ke level berikutnya”, jelas Dessi.

Berdasarkan paparan tersebut, tingkat kematangan keamanan siber Kementerian Pertanian tercatat berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,50 dari target 4,00. Sementara tingkat kematangan persandian juga berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,06. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan dan proses dasar keamanan siber telah tersedia, namun masih memerlukan penguatan implementasi dan integrasi lintas sistem

Tim penilai juga menguraikan sejumlah temuan pada berbagai aspek, mulai dari identifikasi,

proteksi, deteksi, gulih, hingga persandian. Sejumlah praktik baik telah berjalan, seperti keberadaan kebijakan keamanan informasi, audit dan *security awareness*, penerapan kontrol teknis (*firewall*, *Virtual Private Network*, *Endpoint Detection and Response*), serta simulasi pemulihan layanan. Namun demikian, masih terdapat area yang perlu ditingkatkan, antara lain pemusatan dokumentasi kebijakan, penguatan kontrol akses, ketiadaan *Security Information and Event Management* (SIEM) terpusat, optimalisasi SOP deteksi insiden, serta pembentukan fungsi persandian secara formal.

Sebagai bagian dari Exit Meeting IKASANDI, narasumber juga menyampaikan rangkaian rekomendasi strategis yang menjadi dasar penyusunan RTL. Rekomendasi tersebut meliputi penataan dan pemusatan dokumentasi kebijakan keamanan informasi beserta bukti implementasinya dalam satu repositori resmi, penguatan mekanisme pengendalian dokumen, serta optimalisasi peran Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi terdokumentasi dan terintegrasi dengan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* TIK.

Selain itu, disarankan pula pembaruan berkala terhadap regulasi dan standar keamanan siber, penerapan kerangka manajemen perubahan TIK secara menyeluruh, serta penguatan pengelolaan aset informasi dan manajemen risiko, termasuk tindak lanjut terstruktur atas hasil *Vulnerability Assessment* dan *Penetration Testing*.

Pada aspek teknis, BSSN merekomendasikan penerapan kebijakan *Multi-Factor Authentication* (MFA), penguatan kontrol akses pengguna, standarisasi patching berkala, penyusunan baseline konfigurasi jaringan, serta implementasi SIEM sebagai platform terpusat pemantauan keamanan. Rekomendasi juga mencakup penyusunan SOP deteksi dan tanggap insiden, integrasi solusi deteksi yang telah dimiliki dengan mekanisme monitoring terpusat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas fungsi deteksi.

Untuk aspek pemulihan layanan, ditekankan pentingnya pelaksanaan simulasi gulih secara terjadwal, penetapan indikator kinerja pemulihan seperti *Recovery Time Objective* (RTO) dan *Recovery Point Objective* (RPO),

serta pendokumentasian hasil simulasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Sementara pada aspek persandian, direkomendasikan pembentukan unit kerja persandian secara formal, penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS), penugasan SDM persandian yang kompeten, serta perencanaan pengadaan modul kriptografi dan integrasinya ke dalam kerangka keamanan informasi organisasi.

Melalui rapat ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi IKASANDI secara bertahap dan terukur. Rencana tindak lanjut yang disusun diharapkan mampu memperkuat ketahanan siber organisasi sekaligus mendukung layanan digital yang andal, aman, serta melindungi data dan informasi strategis sektor pertanian nasional.

Penulis: Nugroho Setyabudhi

Menakar Ketahanan Pangan Indonesia Lewat Neraca Bahan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memiliki peran strategis dalam menyediakan data pangan yang akurat dan terpercaya. Salah satu instrumen utama yang dikelola Bapanas adalah Neraca Bahan Makanan (NBM), yaitu sistem data yang menggambarkan kondisi penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan serta gizi masyarakat Indonesia secara komprehensif.

Lewat NBM, kondisi pangan nasional tidak hanya dihitung dari seberapa besar produksi, tetapi juga dilihat dari kecukupan energi, protein, dan lemak per kapita, serta keberagaman pangan yang tersedia bagi masyarakat. Data inilah yang menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan pangan dan gizi di tingkat nasional maupun daerah.

Pernahkah kita bertanya, apakah pangan yang tersedia di Indonesia benar-benar cukup dan beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya produksi, tetapi juga oleh bagaimana pangan tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Di sinilah Neraca

Bahan Makanan (NBM) berperan sebagai indikator ketahanan pangan Indonesia.

NBM memotret perjalanan pangan dari hulu ke hilir mulai dari produksi, impor, dan stok, hingga pemanfaatannya oleh masyarakat. Hasilnya bukan sekadar angka tonase, melainkan gambaran nyata tentang ketersediaan energi, protein, dan lemak per kapita setiap hari.

Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin) hadir dalam acara *Focus Group of Discussion* (FGD) Hasil NBM Nasional Tahun 2023-2025 (Rabu, 21/01/2026). Pada kesempatan ini Kapusdatin Intan Rahayu menyampaikan apresiasinya kepada Bapanas yang telah menghitung NBM. “Pusdatin akan tetap mendukung penyusunan, terutama terkait metodologi. Semua data khususnya produksi akan didukung oleh semua instansi terkait di Kementan”, demikian kata Intan.

FGD dibuka dengan paparan dari Ketua Tim Kerja Bapanas, Dina mengatakan “Data NBM 2023–2025 menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein nasional masih berada di atas rekomendasi gizi”. Artinya, secara umum Indonesia belum kekurangan pangan. Namun, ada catatan penting pada tahun 2025, ketersediaan energi, protein, dan lemak mengalami sedikit penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Demikian penjelasan Dina lebih lanjut.

Penurunan ini memang belum mengkhawatirkan, tetapi menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan kondisi yang statis. Ia perlu dijaga secara konsisten, terutama di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika perdagangan global, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Ketahanan pangan tidak hanya soal cukup, tetapi juga beragam. Untuk itu, NBM juga mengukur Skor Pola Pangan Harapan (PPH), indikator yang mencerminkan keseimbangan dan keberagaman pangan yang tersedia.

Kabar baiknya, skor PPH ketersediaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menandakan semakin beragamnya pilihan pangan di Indonesia. Meski demikian, beberapa kelompok pangan seperti pangan hewani dan kacang-kacangan masih perlu diperkuat agar keseimbangan gizi masyarakat semakin optimal.

Dalam periode terbaru, metode penyusunan NBM juga mengalami penyempurnaan. Fokus kini diarahkan pada bahan pangan primer, sehingga data ketersediaan per kapita menjadi lebih akurat dan mudah dibandingkan antarwaktu. Penyederhanaan tabel dan perbaikan angka konversi dilakukan agar NBM semakin relevan sebagai alat perencanaan kebijakan.

Langkah ini penting agar kebijakan pangan tidak hanya berbasis intuisi, tetapi benar-benar berpijak pada data yang solid.

Kini, informasi NBM dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang disediakan Badan Pangan Nasional. Melalui platform ini, publik dapat melihat kondisi ketersediaan pangan dan gizi hingga tingkat daerah, lengkap dengan infografis dan peta interaktif.

Keterbukaan data ini diharapkan mendorong partisipasi lebih luas dalam menjaga ketahanan pangan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

NBM mengajarkan satu hal penting, pangan adalah urusan bersama. Data yang akurat membantu petani dan peternak lebih sejahtera, pedagang memperoleh keuntungan yang adil, dan masyarakat mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi. Karena ketahanan pangan yang kuat bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi tentang kehidupan yang lebih sehat dan masa depan yang lebih pasti bagi seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Pertanian harus dapat mewujudkan semua itu untuk seluruh petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.

Bantuan Pangan Untuk Sumatera

Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan senilai

Rp 75,5 Miliar

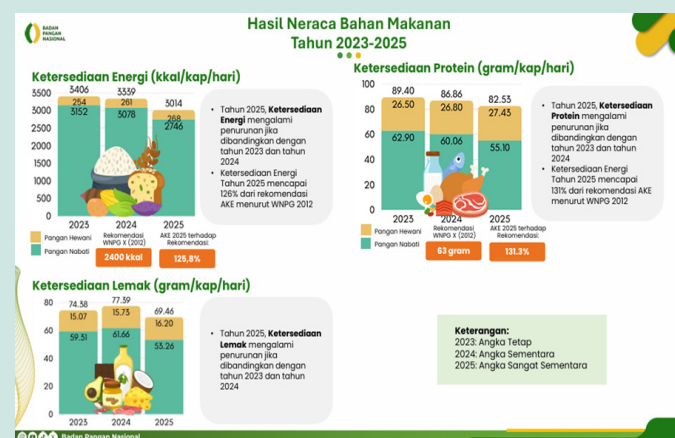
untuk masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Total Bantuan:

- ✓ **34 Ribu** Ton Beras
- ✓ **6,8 Juta** Liter Minyak Goreng

Provinsi	Ton Beras	Ton Minyak Goreng
✓ Aceh	10.614	1.954
✓ Sumut	16.894	3.108
✓ Sumbawa	6.795	1.250

Termasuk bantuan tambahan: benih, obat-obatan, makanan siap konsumsi, susu, dan kebutuhan darurat lainnya.



Gambaran Data NBM Tahun 2023 - 2025

Penulis: Wieta B. Komalasari



satudata.pertanian.go.id